

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diplomasi merupakan salah satu Instrumen yang selalu dipakai dalam hubungan internasional. Baik dalam mencapai kepentingan suatu Negara maupun sebagai proses dari implementasi kebijakan Luar Negeri suatu Negara. Negara dapat membangun image atau citra tentang negaranya dalam konteks tawar menawar atau membangun branding melalui diplomasi.

Pada awalnya diplomasi hanya didominasi oleh Negara. Negara melakukan komunikasi antar negara untuk mencapai kepentingan salah satu negara tersebut. Dalam prakteknya, negara melalui departemen luar negerinya melakukan praktek diplomasi yang berkaitan dengan masalah kenegaraan seperti hubungan bilateral, hubungan multilateral, perjanjian internasional, konferensi internasional dan lain- lainnya.

Pada era perkembangan zaman saat ini, diplomasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Diplomasi tidak hanya fokus terhadap hubungan antar negara melainkan hubungan negara dengan aktor lainnya. Maka munculah *second track* diplomacy atau diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor luar negeri selain negara. Dalam hal ini aktor luar negeri bukan hanya negara antar negara. Melainkan muncul aktor lain yang mendominasi dalam diplomasi modern saat ini. Ada organisasi internasional dan organisasi non pemerintah dalam di dalam negeri (NGO), perusahaan multinasional (MNC), dan individu. Munculnya aktor- aktor baru dalam diplomasi menandai bahwa

hubungan antar negara yang semakin kompleks. Negara tidak dapat menangani seluruh permasalahan atau urusan yang dilaksanakan oleh aktor non pemerintah. Maka dari itu, semakin berkembangnya hubungan antar manusia yang semakin kompleks dan tidak terbatas, maka peran aktor non negara menjadi sangat penting. (Effendi, 2008)

Semakin berkembang dan munculnya aktor- aktor baru dalam dunia diplomasi hal ini ditandai masuknya era baru dalam dunia diplomasi yang dikenal dengan diplomasi baru atau diplomasi terbuka. Diplomasi baru atau terbuka ini dikenalkan oleh Woodrow Wilson yang merupakan Presiden Amerika Serikat melalui pidatonya *Fourteen Points* yang dikenal sebagai berikut : “Perjanjian damai yang terbuka yang dicapai secara terbuka tak boleh diikuti dengan pengertian (*understanding*) internasional secara tersendiri dalam bentuk apa pun, tetapi diplomasi harus berlangsung secara terbuka dan diketahui umum”. (Roy S. L., 1995) Memasuki era baru dalam diplomasi atau diplomasi baru, hal ini menjadikan peran dan aktivitas diplomasi lebih melibatkan masyarakat melalui aktivitas diplomasi publik atau diplomasi multijalur (*multi track diplomacy*), bukan lagi diplomasi tradisional yang melibatkan pejabat-pejabat negara. (Hermawan, 2007)

Setiap Negara memiliki cara masing- masing dalam melaksanakan diplomasi publik mereka. Ada yang melaksanakan dengan menggunakan cara *Soft Diplomacy* dan juga ada yang menggunakan *Hard Diplomacy*. Amerika Serikat memulai diplomasi publiknya dengan mendirikan USIA (U.S. Information Agency) pada tahun 1953. Selama 46 tahun USIA telah mewakili Amerika dalam dunia internasional melalui informasi, budaya dan program seni serta menyampaikan berita berskala internasional melalui VOA atau Voice of America, publikasi melalui perpustakaan, program penyebaran ide melalui pidato dan pameran. Menurut Ronald I. Rubin USIA tidak dipercaya lagi untuk mengelola program budaya karena program budaya yang selama itu dijalankan terikat pada urusan atau isu politik tertentu. Selain dari itu

Rubin mengakui adanya pandangan yang berbeda dari para birokrat mengenai pengelolaan USIA. Melihat hal tersebut terjadi, kemudian pemerintah AS mengesahkan *The mutual Educational and Cultural Exchange Act* pada tahun 1961 untuk mempeluas komitmen AS kepada masyarakat internasional. Tujuannya untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan negara lain melalui pendidikan dan budaya. (Rachmawati, Iva, 2016)

Selama proses perjalanan waktu, USIA mengalami perubahan sebagai mana perubahan tersebut terjadi pada tujuan arah diplomasi publik Amerika. Perubahan tersebut terjadi pada perombakan struktur secara organisatoris dan juga mengubah mandat/ urusan yang tidak hanya fokus terhadap lingkup internasional melainkan urusan domestik juga menjadi fokus dari misinya. Hingga pada tahun 1999 USIA resmi ditutup melalui pemerintahan Clinton melalui *the foreign Affairs Reform and Re-structuring Act* tahun 1998. Peristiwa 11 September 2001 mengubah strategi diplomasi publik Amerika yang fokus terhadap keamanan negaranya. Hal ini membuat Presiden George Bush mengambil tindakan yang disebut GWOT (*Global War on Terror*) sebagai upaya diplomasi publik Amerika untuk pemberantasan terorisme dan upaya untuk memberikan informasi lebih baik mengenai Amerika pada dunia terutama negara- negara yang dikhawatirkan memiliki potensi atas tumbuhnya terorisme. (Rachmawati, 2016)

Adanya agenda GWOT (*Global War on Terror*) sebagai bentuk perlawanan Amerika terhadap terror yang dialaminya pada peristiwa 11 september 2001. Upaya Amerika dalam mempromosikan agenda GWOT ini mendapatkan respon yang sangat buruk dari negara lain terutama negara Islam. Hal ini menunjukkan citra buruk Amerika di mata negara Muslim di dunia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa sentimen Anti-Amerika muncul sangat kuat di negara-negara muslim pasca penerapan kebijakan GWOT. Akibat adanya GWOT membuat Amerika mendapatkan citra yang sangat buruk di mata negara- negara

Muslim di dunia yang mengakibatkan munculnya Islamophobia. (Rahman, 2019)

Pada tahun 2005, George Bush merealisasikan ide *listening tour* sebagai upaya untuk diplomasi publik AS diarahkan kepada negara- negara yang ditengarai memiliki potensi munculnya kelompok- kelompok yang berseberangan dengan Amerika. Setelah ditutupnya USIA sebagai institusi diplomasi publik Amerika dibawah Departemen Luar Negeri, pada tahun 2002 Dewan Keamanan Nasional mendirikan *Strategic Communication Policy Coordinating Committee* yang bertugas untuk membentuk strategi komunikasi nasional. Namun institusi tersebut tidak bertahan lama dan kemudian ditutup karena perang Irak. Kemudian pada Juli 2002 George Bush membentuk kembali *Office of Global Communication* yang memiliki tugas yang sama dengan institusi sebelumnya. Namun institusi ini kembali di bubarkan pada tahun 2005.

Pada bulan April 2006, Penasehat Keamanan Nasional Stephen Hanley membentuk institusi baru yaitu *Policy Coordinating Committee for Public Diplomacy and Strategic Communication* (PCC) yang langsung di bawah *Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs*. PCC bertujuan untuk mengkoordinasi antar institusi dalam Pemerintahan Amerika dalam menjalin komunikasi dengan publik di luar negeri. Kemudian pada tahun 2007, PCC mengeluarkan *National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication* yang mempunyai tujuan sebagai instrumen komunikasi internasional Amerika. (Rachmawati, 2016)

Citra Amerika yang buruk terus berkembang ketika era kepemimpinan George Bush. Pada tahun 2009, Obama berhasil menjadi Presiden Amerika. Salah satu fokusnya ialah mengembalikan citra Amerika menjadi pulih kembali. Selama delapan tahun pemerintahan Bush, peringkat kesukaan Amerika Serikat telah menurun secara dramatis. Amerika Serikat dipandang negatif oleh negara-negara mayoritas Muslim. Anti-

Amerikanisme telah menjadi trend baru di dunia Arab, dan juga Nigeria di Afrika Barat, terus ke Indonesia di Timur jauh. Hal ini mengakibatkan peringkat Amerika Serikat berada di posisi terendah setelah ditinggalkan oleh Presiden Bush. (Zahrana, 2009). Dalam masa kepemimpinan Obama, Amerika menjadi negara yang mengedepankan diplomasi soft Power untuk mengembalikan citra baik Amerika dimata publik. Berbeda dengan pada era Bush, Amerika cenderung lebih mengedepankan politik luar negeri yang berbasis hard power.

Perubahan arah kebijakan diplomasi publik Amerika diikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Munculnya era globalisasi membuat tata cara hidup masyarakat di dunia. Hal ini juga mengakibatkan pola interaksi berubah. Yang mana sebelum abad 21 pola interaksi melibatkan manusia bertemu tatap muka untuk menghasilkan keinginannya. Juga dalam dunia internasional diplomasi harus dijalankan antara kedua pihak untuk bernegosiasi secara tatap muka untuk mencapai kepentingan yang diinginkannya.

Praktek diplomasi masa kini dipengaruhi oleh beberapa hal, tiga diantaranya adalah: Revolusi teknologi informasi; Meningkatnya peran media massa; dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Hubungan Internasional. Revolusi teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam praktik diplomasi. (Djelantik, 2008) Hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin cetak 5 abad yang lalu oleh Guttenberg. Dalam temuannya tersebut mengungkapkan bahwa akses informasi tidak lagi terbatas dan dapat diakses oleh kelompok- kelompok pejabat dalam pemerintahan. Melainkan informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal ini ditandai dengan tersedianya jaringan komputer dan elektronik.

Barry Fulton menjaelaskan lebih jauh mengenai perubahan-perubahan tersebut yaitu: Negara-negara yang sebelumnya dihubungkan oleh Kementerian Luar Negeri dan aktivitas perdagangan, sekarang terhubung melalui aktivitas komunikasi

antar individu melalui teknologi serat optik, satelit, wireless, yang merupakan bagian dari sebuah jaringan yang kompleks dan tanpa pengawasan terpusat. Teknologi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat bukan lagi masalah relevan, sehingga diplomasi tradisional berjuang untuk mempertahankan relevansinya. (Djelantik, 2008)

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat maupun negara. Masyarakat telah mengalami perubahan dalam pola kehidupan akibat adanya percepatan dalam dunia teknologi belakangan ini. Salah satunya dengan meningkatnya Internet dan *WWW (World Wide Web)*. Internet menjadi akses kebutuhan sehari-hari masyarakat. Adanya Internet juga mengubah pola interaksi masyarakat modern saat ini dan mengubah pola interaksi antar negara. Pada awal tahun 2000, penggunaan akses internet di AS sekitar setengah dari semua orang dewasa sudah online. Mulai tahun 2002, akses internet di AS terus berkembang hingga pada tahun 2009 mencapai 76% dari total populasi masyarakat AS. (Pewresearchcenter, 2019) Sedangkan untuk akses penggunaan media sosial pun sangat banyak diminati oleh warga AS. Penggunaan media sosial pada tahun 2009 berkisar 70% dari populasi masyarakat AS. Dan para pengguna media sosial lebih menyukai menggunakan youtube dan facebook. Basis penggunanya paling mewakili populasi secara keseluruhan. (Pewresearchcenter, 2019)

Dalam konteks hubungan internasional, teknologi dan informasi menjadi peranan penting dalam upaya mencapai kepentingan nasional melalui instrumen diplomasi. Diplomasi antar aktor internasional yang bermula menggunakan cara-cara tradisional seperti negosiasi formal dan kini telah bergeser menjadi diplomasi berbasis teknologi. Upaya untuk mencapai kepentingan dapat dicapai dengan menggunakan teknologi dan informasi. (Sapta Dwikardana, 2017) Saat ini dikenal dengan istilah diplomasi digital atau yang sering disebut *eDiplomacy*, *cyber diplomacy*, atau *twiplomacy*. (Holmes, 2015)

Diplomasi digital hadir sebagai bentuk majunya perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di era teknologi yang semakin pesat berkembang ini. Praktik diplomasi digital menjadi hal baru yang diterapkan dalam mencapai kepentingan suatu negara. Akhir- akhir ini banyak negara yang menggunakan akses internet untuk mempercepat informasi pemerintahannya kepada publik. Seperti halnya kedutaan besar diberbagai Negara, Departemen Luar Negeri dan diplomat. Berkembangnya media sosial yang dijadikan konsumsi sehari- hari oleh khalayak publik menjadikan kebutuhan diplomasi digital semakin berkembang. Adanya Facebook, Twitter, Instagram, blog maupun website yang mana aktivitas politik atau berita politik sering muncul melalui saluran- saluran media sosial tersebut serta memudahkan para aktor dunia internasional untuk komunikasi dan mencapai kepentingan dengan menggunakan teknologi.

Sebagai wujud dari perkembangan teknologi, Amerika Serikat mulai melakukan transformasi menuju digitalisasi dalam melaksanakan aktivitas diplomasinya. Pada tahun 2003, melalui Departemen Luar Negerinya, AS mendirikan *Office of Diplomacy* sebagai upaya untuk meningkatkan serta memperkuat diplomasi AS menggunakan teknologi baru melalui platform digital seperti, media sosial dan teknologi informasi. (U.S Department of State, 2019) Adanya *office of Diplomacy* AS, dapat diakui manfaatnya oleh departemen negara yang lain hingga kini tercatat ada 25 cabang *eDiplomacy* yang berbeda di dalam departmen luar negeri AS. (Hanson, Fergus, 2012).

Keseriusan AS dalam menerapkan teknologi sebagai instrumen dalam diplomasi terlihat dari kebijakan *21st Century Statecraft* yang dicanangkan oleh sekretaris Hillary Clinton. Pada tahun 2009, Hillary Clinton melalui Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan inisiatif *21st Century Statecraft* sebagai alat diplomasi baru dalam upaya untuk mengahadap tantangan baru di abad ke 21. Kemudian, pada bulan Mei 2009, Hillary Clinton memperkenalkan *21st Century Statecraft*

melalui pidatonya bahwa Kebijakan ini sebagai instrumen bagi AS untuk mencari teman baru dalam menyebarkan sayap diplomasi AS dan juga menggunakan alat- alat baru unuk meningkatkan diplomasinya. (State U. D., 2009) Dalam situs Departemen Luar Negeri AS, dikemukakan bahwa *21st Century Statecraft* dibangun untuk fokus membangun area-area sebagai berikut: Mengubah metode diplomasi, pendekatan baru terhadap program pembangunan, fokus terhadap masalah kebijakan baru, pekerjaan yang fokus dalam kedutaan, biro, dan kantor- kantor pemerintahan. (U.S Department of State, 2019).

21 st Century Statecraf mempunyai tujuan untuk memberikan tata cara baru dalam instrumen kebijakan publik dengan menggunakan teknologi serta membangun konnektivitas jaringan secara inovatif dan terintegrasi. Kemudian menjamin kebebasan setiap hak warga negara untuk berpendapat, bebas mengutarakan ekspresi melalui media sosial. Untuk masyarakat sipil, pemerintah berhak memberikan jaminan serta mendukung organisasi masyarakat sipil unuk mencapai tujuan mereka dengan menggunakan teknologi dan internet. Pemerintah AS melalui Departemen Luar Negerinya berupaya untuk mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam aktivitas yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri itu sendiri seperti menggunakan media sosial sebagai platfrom baru dalam diplomasi publik AS untuk mendapatkan citra baru kepada khalayak publik dan juga untuk mencapai kepentingan yang diinginkannya. (U.S Department of State, 2019)

Dalam laporan *Quedriennial Diplomacy and Development Review (QDDR)* yang dikeluarkan AS menjelaskan bahwa AS dapat membangun instrumen baru unuk membangun komunikasi, menciptakan kolaborari, serta melaksanakan perdagangan global di abad ke 21 dengan menggunakan internet, sosial media, serta beberapa aplikasi mobile yang menghubungkan dan juga mengintegrasikan berbagai tempat di dunia. Hal ini juga akan menciptakan hubungan kerja sama dengan aktor- aktor non negara seperti masyarakat sipil,

organisasi, dan lainnya untuk mencapai kepentingan dalam kebijakan luar negerinya. (QDDR, 2010)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

Bagaimana upaya diplomasi publik Obama untuk memperbaiki citra AS yang diwarisi dari Kepemimpinan Presiden Bush ?

C. Kerangka Pemikiran

1. Diplomasi Publik

Diplomasi menurut Harlot Nicholson merupakan asal kata dari bahasa Yunani yaitu *diploum* yang berarti *melipat*. Secara teori diplomasi merupakan sebuah tindakan yang dijalankan oleh perwakilan negara yang ditujukan oleh negara tersebut secara resmi untuk melakukan negosiasi kepada negara lain. (Roy S. L., 1991) Diplomasi merupakan seni atau teknik yang digunakan dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Menurut Nicholas J. Cull menyatakan bahwa diplomasi publik ialah proses yang dilakukan suatu negara maupun aktor non negara untuk saling mempengaruhi atau *mutual-influence* dalam membentuk kebijakan agar dapat memetakan opini positif publik di negara lain. (Cull, 2010) Menurut Tuch tujuan diplomasi publik adalah upaya suatu negara untuk membuat publik dan pemerintah negara lain mengerti dan memahami nilai, institusi dan budayanya sejalan dengan kepentingan dan kebijakan luar negerinya. (Tuch H. , 1990) Hal ini membuktikan bahwa diplomasi berfungsi sebagai sarana

kebijakan luar negeri suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya.

John Robert Kelley mengklasifikasikan pelaksanaan diplomasi publik terdiri dari tiga bagian, yaitu : (1) *Information*, negara mampu mengelola atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi dengan menitikberatkan pada suatu peristiwa maupun konflik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. (2) *Influence*, negara mampu mempengaruhi perubahan sikap atau opini publik di negara tujuan. (3) *Engagement*, negara dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan pemahaman publik di negara lain dalam melakukan hubungan kerja sama yang berorientasi jangka panjang. (Rasmussen, 2009) Berdasarkan ketiga bagian di atas menjelaskan bahwa diplomasi publik sebagai upaya dalam membangun hubungan dengan negara lain. Serta negara dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan citra baik kepada negara lain.

Dalam perkembangan teknologi dan informasi, diplomasi publik mengalami pergeseran kedalam sistem digital. Pengaruh teknologi menjadi salah satu sumbangan utama bagi revolusi diplomasi publik. Hal ini dikemukakan oleh Van Ham bahwa diplomasi publik alat postmodern milik negara yang berusaha menggapai kembali legitimasi dan pengakuan di tengah dunia global yang kehilangan monopolinya dalam proses informasi. Hal ini merupakan pengakuan terhadap pengaruh kemajuan teknologi komunikasi yang memberikan bentuk interaksi baru kepada warga publik secara lebih luas. (Rachmawati, 2016)

Adanya perkembangan arus informasi menandakan diplomasi publik tidak hanya terfokus pada satu arah. Diplomasi publik yang baru merupakan perubahan pola utama dalam komunikasi politik internasional. Yang mana diplomasi publik yang baru ini bersifat dialogis, kolaboratif, dan eksklusif. Ini merupakan terobosan dari model penyiaran dan memanfaatkan media sosial untuk membangun keterlibatan dua arah dengan publik. Melalui media sosial dan internet negara

dapat mengkomunikasikan kebijakan luar negerinya serta dapat membangun image positif terhadap masyarakat internasional. (Pamment, 2017)

2. eDiplomacy

Lajunya pertumbuhan teknologi dan informasi mengubah tata cara diplomasi suatu negara. Yang mana dulunya negara hanya mampu bernegosiasi melalui pertemuan secara langsung, konferensi serta acara-acara yang melibatkan negara mengirimkan utusannya untuk datang ke Negara lain dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan kebijakan Luar Negeri negara tersebut. Namun kini berkat adanya teknologi, aktivitas diplomasi suatu negara mengalami perubahan. Dari diplomasi tradisional menjadi diplomasi modern dengan menggunakan teknologi serta jaringan Internet. Hal ini dikatakan sebagai eDiplomacy atau yang yang dikenal dengan diplomasi digital.

eDiplomacy pertama kali dikenalkan oleh Wilson Dizard melalui bukunya yang berjudul *Digital Diplomacy : U.S Foreign Policy in the Information Age*. Dalam bukunya tersebut Dizard mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara telah dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. (Dizard, 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Fergus Hanson dalam *Revolution @State: The Spread of Ediplomacy* yang diterbitkan oleh *Lowy Institut For Internatonal Policy* menjelaskan bahwa eDiplomacy ialah Sebagai sarana media diplomasi menggunakan Web dan TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) baru untuk membantu melaksanakan tujuan diplomatik. (Hanson, Fergus, 2012). Perkembangan teknologi informasi mengubah cara negara dalam menyikapi isu internasional serta mengubah suatu negara dalam menyikapi dan mengambil tindakan melalui kebijakan luar negerinya.

Dalam bukunya Dizard menjelaskan bahwa terdapat tiga tren yang menjadi peran suatu negara dalam diplomasi digital

sebagai upaya untuk diterapkan dalam kebijakan Luar Negeri suatu negara (Dizart, 2011) :

1. Adanya isu- isu kebijakan luar negeri yang melibatkan sumber daya komunikasi dan informasi yang canggih. Perubahan ini sebagian besar didorong oleh majunya perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi secara tidak langsung telah menggerakkan kekuatan politik dan ekonomi yang merubah kepentingan geopolitik Amerika.
2. Perubahan dalam organisasi sumber daya informasi di dalam Departemen Luar Negeri terutama di AS dan lembaga urusan luar negeri lainnya seperti biro- biro di luar negeri serta agen-agen terkait dalam kebijakan luar negeri
3. Munculnya diplomasi publik dengan menggunakan teknologi digital untuk mempengaruhi opini publik.

Ketiga poin diatas (kebijakan, operasi, diplomasi publik) merupakan perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut juga memberikan dampak terhadap kebijakan luar negeri yang memicu kehadiran diplomasi digital.

Departement Luar Negeri AS menjelaskan bahwa eDiplomacy merupakan fasilitas yang digunakan dalam berdiplomasi dengan menggunakan instrumen baru untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan aktivitas diplomasi AS melalui internet dan media Sosial. eDiplomacy juga berfungsi untuk menerima serta merespon informasi- informasi yang didapatkan dari berbagai negara dalam menindaklanjuti kepentingan AS yang dilakukan di dunia maya. Deplu AS juga membentuk badan khusus yang menangani masalah eDiplomacy dengan tujuan untuk membawa diplomat AS dalam proses –proses pengambilan keputusan melalui teknologi informasi, meningkatkan

hubungan dan peran serta AS terhadap masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, dan meningkatkan manajemen informasi dan pengetahuan di dunia maya. Kemudian penguatan kebijakan luar negeri AS dengan memberikan data dan informasi yang akurat kepada para diplomat dan juga staf Deplu dimanapun pos diplomasi mereka di seluruh dunia. (Effendi, Tonny Dian, 2008)

eDiplomacy mempunyai kelebihan yang berbeda dengan diplomasi publik yang dijalankan secara konvensional. Munculnya aktor-aktor non negara mengubah tata cara diplomasi suatu negara terutama yang dijalankan oleh AS. AS menggunakan eDiplomacy untuk memudahkan negaranya dalam membentuk jaringan- jaringan antar aktor dan aktor-aktor tersebut menggunakan teknologi sebagai upaya untuk mencapai tujuan politiknya. Hal ini yang terjadi pasca peristiwa 9/11 yang dimana dijelaskan pada buku yang berjudul *Battle to Bridges: U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy After 9/11*, zahrana menjelaskan bahwa pasca 9/11 kemajuan teknologi mengubah berbagai komponen ptaktik diplomasi AS. Terlihat dari upaya Presiden George Bush dalam menjangkau aktor-aktor di berbagai negara untuk memberikan informasi mengenai AS pada dunia terutama negara- negara yang sangat khawatir akan tumbuhnya terorisme.

eDiplomacy merupakan bagian dari perhatian utama AS pada masa kepemimpinan Obama. Hal ini ditunjukkan dibentuknya kebijakan 21st Century Statecraft dalam upaya menyebarkan luaskan informasi ke ranah publik dengan menggunakan sosial media dan juga platform- platform teknologi lainnya. Penggunaan platform sosial media antara lain twitter, facebook, instagram dan yang lainnya dalam ranah pemerintahan memudahkan para staff Deplu terutama diplomat dalam memperluas jangkauan informasi serta dapat menyatukan mereka dalam kancah internasional dengan menggunakan cara- cara inovatif. (Sandre, 2013) eDiplomacy juga dapat memberikan pengaruh strategi kebijakan luar negeri yang lebih baik dalam hubungan suatu negara di level bilateral

dan juga multilateral. Selain itu eDiplomacy juga dapat membantu untuk melengkapi diplomasi tradisional dengan cara- cara inovatif.

Kemampuan media sosial dapat memberikan kemudahan konektivitas pada politik internasional dan juga aktivitas sosial yang terjadi. Tak hanya itu media sosial juga dapat menyelesaikan isu- isu pemerintahan secara global dan hubungan antar negara serta dapat menghubungkan tiap individu, negara, dan aktor non negara. (Funk, 2013) Keuntungan dari menggunakan media sosial ialah dapat menghubungkan pengguna yang menyebabkan adanya pertukaran ide atau gagasan lintas wilayah. Sehingga dapat menciptakan komunikasi dua arah. Keuntungan tersebut dapat membuat jangkauan informasi yang lebih luas dan juga tidak mengeluarkan biaya yang sangat mahal.

Pada kepemimpinan Presiden Obama, AS juga menggunakan media sosial sebagai upaya untuk mengembalikan citra buruk yang selama ini timbul pada era George Bush. AS berusaha meraih simpati publik dengan menggunakan platform media sosial seperti twitter, youtube, website dan lainnya sebagai sarana diplomasi dan arah kebijakan luar negeri Amerika. Dan berbagai upaya lainnya yang dilalukan Obama untuk mempengaruhi publik internasional dalam memberikan citra positif kepada AS. Penggunaan internet dan media sosial oleh Obama dinilai sangat efektif dalam menjalankan diplomasi publik serta program kebijakan di Pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengguna akses internet dan media sosial yang ada di AS.

D. Hipotesa

Upaya diplomasi publik Barrack Obama dalam memperbaiki citra buruk AS yang diwarisi dari Presiden

George W. Bush dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dan media sosial.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mengkaji dan memberi gambaran objektif mengenai upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam menerapkan diplomasi digital sebagai sarana baru dalam diplomasi publiknya.

F. Batasan Penelitian

Penulis membatasi lingkup penelitian ini hanya pada penerapan diplomasi digital Amerika Serikat yang dijalankan oleh Presiden Barrack Obama. Dalam rentang waktu kepemimpinan presiden Amerika Serikat yang ke-44 saja, yaitu pada masa jabatan Barak Obama tahun 2009- 2017.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah Studi Literatur dan Online Research yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi, majalah ilmiah dan buku-buku teks yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah berupa data sekunder dari literature (buku, jurnal ilmiah, media cetak dan situs internet).

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis

oleh teori dengan sistematis agar bisa mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut

H. Sistematika Tulisan

Dalam penelitian akan membagi bentuk penelitian menjadi lima bab untuk menjelaskan mengenai topik penelitian berjudul “ **Penerapan Diplomasi Digital Amerika Serikat melalui Kebijakan *21st Century Statecraft* Pada era Kepemimpinan Barrack Obama tahun 2009- 2017**”

BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Penulis menerangkan Perkembangan diplomasi publik Amerika Serikat yang dalam perkembangannya menggunakan berbagai sarana. Penjelasan mengenai diplomasi publik dimulai sejak awal Amerika Serikat dalam menerapkan diplomasi publiknya saat Perang Dunia I, II dan Perang dingin hingga era Presiden George W. Bush.

BAB III Penulis menjelaskan mengenai internet dan media sosial sebagai kunci kunci kemenangan Obama sebagai Presiden AS. Yang akan dijelaskan dengan latar belakang Presiden Obama sebelum menjadi Presiden AS. Dalam perjalanan politiknya sebelum jadi Presiden AS Obama telah melakukan diplomasi publik untuk kepentingan dirinya dan juga menggunakan internet dan media sosial ketika kampanye memenangkan Pemilu AS.

BAB IV Penulis menjelaskan mengenai penerapan diplomasi digital Amerika Serikat. Mulai dari pembentukan lembaga, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana diplomasi dalam kebijakan luar negerinya. Penulis juga akan menjelaskan upaya dari Presiden Barrack Obama dalam memulihkan citra

Amerika dengan menggunakan penerapan diplomasi digital tersebut.

BAB V Berisi tentang kesimpulan- kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.